

Sidang Korupsi Bea Cukai Uji Kebenaran ‘List Coklat’

Category: HUKUM

written by Redaksi | June 4, 2026



SEANTERONEWS.com – Jalannya persidangan perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini tengah menjadi sorotan tajam. Proses hukum yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dinilai menjadi momentum krusial untuk menguji berbagai rumor yang telanjur berkembang di ruang publik, termasuk teka-teki dokumen berkode warna seperti “List Biru”, [“List Coklat”](#), hingga “Coklat Tua”.

Hampir empat bulan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengguncang instansi bea cukai, kejelasan mengenai daftar tersebut masih dinanti.

Momentum Pembuktian Terbuka Setelah Empat Bulan OTT

Spesialis Analisis Kontra Intelijen, Gautama Wiranegara,

menilai bahwa ruang sidang adalah satu-satunya tempat yang paling objektif untuk menguji keabsahan seluruh alat bukti secara transparan. Menurutnya, keterbukaan informasi dalam persidangan sangat penting agar tidak ada spekulasi liar yang berkembang di tengah masyarakat.

“Persidangan adalah ruang pembuktian yang sah. Di meja pengadilan itulah dokumen seperti ‘[List Coklat](#)’, jika memang benar ada, akan terungkap secara terang-benderang ke permukaan, atau sebaliknya, akan gugur dengan sendirinya. KPK tidak perlu ragu untuk memetakan perkara ini secara utuh berdasarkan fakta hukum,” ujar Gautama dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis (4/6/2026).

Teka-Teki di Balik Kode Warna: ‘Biru’ Hingga ‘Coklat Tua’

Sejauh ini, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) baru menjangkau keterlibatan sejumlah pejabat teknis bea cukai yang namanya muncul dalam berkas perkara. Namun, identitas pihak-pihak lain yang dikaitkan dengan istilah sandi “List Coklat” dan “Coklat Tua” masih menyisakan tanda tanya besar di benak publik.

Gautama menjelaskan bahwa dalam metodologi kontra intelijen, penggunaan kode warna biasanya merepresentasikan klasifikasi atau kelompok tertentu.

“Jika kode ‘Biru’ diidentifikasi sebagai representasi dari pejabat teknis di lapangan, lalu untuk siapa kode ‘Coklat’ dan ‘Coklat Tua’ tersebut disematkan? Apakah ini merujuk pada jejaring pengusaha skala besar, aparat penegak hukum dari instansi lain, atau mungkin figur politis? Teka-teki ini harus dibedah di persidangan agar publik mendapatkan jawaban yang jujur,” jelas Gautama.

Desakan Kepastian Hukum Bagi Industri

Logistik Global

Di sisi lain, KPK sebelumnya mengonfirmasi tengah mendalami peran dari sekitar 20 perusahaan jasa pengiriman barang (forwarder) yang beroperasi di beberapa pelabuhan utama. Kendati demikian, hingga tahap persidangan saat ini, fokus pembuktian masih tertuju pada entitas Blue Ray Cargo serta beberapa oknum pejabat DJBC yang telah menyangsang status terdakwa.

Situasi ini dinilai berpotensi menciptakan ketidakpastian iklim usaha di sektor logistik dan perdagangan internasional. Perusahaan logistik global sangat membutuhkan kepastian hukum yang konkret mengenai entitas mana saja yang benar-benar melakukan pelanggaran hukum, serta entitas mana yang hanya terseret dalam proses pengembangan penyelidikan.

“Ketidakjelasan status hukum dalam jangka waktu yang lama dapat merugikan reputasi dunia usaha. Industri logistik sangat bergantung pada stabilitas dan kepastian regulasi, bukan pada spekulasi yang berkembang,” tambah Gautama.

Memasuki tahap pembuktian bagi terdakwa dari pihak Blue Ray Cargo, JPU kini memiliki keleluasaan untuk membeberkan seluruh barang bukti hasil penyitaan.

Persidangan ini diharapkan mampu mengurai seluruh benang kusut perkara, mulai dari keberadaan dokumen berkode warna, pengembangan keterlibatan pihak luar, hingga dugaan manipulasi parameter pemeriksaan fisik barang impor yang sempat tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi.

Gautama mendorong KPK untuk menyajikan perkembangan kasus ini secara objektif guna menghindari persepsi adanya penegakan hukum yang tebang pilih. Menurutnya, para pelaku bisnis membutuhkan kepastian penegakan hukum yang transparan dan akuntabel demi kelangsungan ekonomi nasional.